

**PENGARUH ASPEK FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP  
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2012-2014**

(Skripsi)

Oleh

**ETANIA ANJANI**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## ABSTRACT

### **THE INFLUENCE OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASPECTS OF THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA YEARS 2012-2014**

**By  
ETANIA ANJANI**

*This study aims to examine the influence of financial aspects (independence and dependence level) and non-financial aspects (the level of health and education) of the performance of local government in Indonesia. Local government performance is measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) derived from local government organizers report (LPPD).*

*The population used in this study is regency/city of Indonesia for the period of 2012-2014. Samples were obtained are as much 156 regencies/cities in Indonesia. The method used in this study is multiple regression with panel data and fixed effect model.*

*The results found that the financial and non-financial aspects which is represented by independence level, dependence level, the level of health, and education level are significantly affect to the performance of local government in Indonesia.*

***Keywords: Financial Aspect, Non-Financial Aspect, Local Government Performance, The Evaluation of Local Government Performance (EKPPD).***

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH ASPEK FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2012-2014**

**Oleh  
ETANIA ANJANI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aspek finansial (tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan) serta aspek non finansial (tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD) melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yang terdapat di Indonesia untuk tahun 2012 – 2014. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 156 kabupaten/kota di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi berganda data panel dengan model efek tetap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek finansial dan non finansial yaitu tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

**Kata Kunci: Aspek Finansial, Aspek Non Finansial, Kinerja Pemerintah Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).**

**PENGARUH ASPEK FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP  
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2012-2014**

Oleh

**ETANIA ANJANI**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH ASPEK FINANSIAL DAN NON  
FINANSIAL TERHADAP KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
INDONESIA TAHUN 2012-2014**

Nama Mahasiswa : **Etania Anjani**

No. Pokok Mahasiswa : **1341031014**

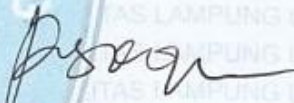
Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**




**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  
NIP. 19750620 200012 2 001

  
**Pigo Nauli, S.E., M.Si.**  
NIP. 19820623 200812 1 001

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**



**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP. 19620612 199010 2 001

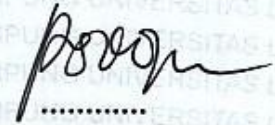
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

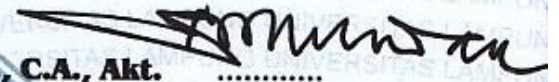
**Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**



**Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Si.**



**Penguji Utama : Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., C.A., Akt.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP. 19610904 198703 1 011



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Etania Anjani**

**NPM : 1341031014**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Aspek Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012-2014” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juli 2017

Penulis,



**Etania Anjani**  
**NPM. 1341031014**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta, 26 Juli 1995 sebagai putri pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Hendra Gunawan, S.E. dan Dra. Sulianti.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Islam Al-Amin pada tahun 2001. Kemudian pendidikan dasar di SDN 2 Rawa Laut (Teladan) hingga tahun 2007. Lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2010 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Paralel. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi sebagai Brigadir Muda BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FEB Unila periode 2013-2014. Selain itu, penulis juga pernah diamanahkan menjadi pengurus UKMF EBEC (*Economic and Business Entrepreneur Club*) Unila sebagai Sekretaris Bidang IV periode 2014-2015. Kemudian diamanahkan kembali menjadi pengurus Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila sebagai Kepala Bidang II periode 2015-2016.



## **MOTTO**

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.”

**(Q.S. Gafir:60)**

“Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan  
(keperluan) nya.”

**(Q.S. At-Talaq:03)**

*“A goal without a plan is just a wish.”*

*(Anonymous)*

*“It’s not about being the best, but doing the best.”*

*(Anonymous)*

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil' alamin*

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini, karya ini

kupersembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku tercinta,*

*Ayahanda Hendra Gunawan, S.E. dan Ibunda Dra. Sulianti*

*Kedua adikku tersayang,*

*M. Fakhri Syukri dan M. Rizky Rakhman*

*Teman-teman seperjuangan terbaikku*

*serta*

*Almamaterku tercinta,*

*Universitas Lampung*

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Aspek Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012-2014” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, perhatian, bimbingan, serta nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, serta nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., C.A., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan evaluasi serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Chara P. Tidespania Tubarad, S.E., M.Acc., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses belajar.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tuaku; Ayahanda Hendra Gunawan, S.E. dan Ibunda Dra. Sulianti untuk segala bentuk dukungan, didikan, dan perjuangannya demi keberhasilanku. Terimakasih untuk doa, nasihat, serta motivasi yang tak henti-hentinya selama ini.
10. Kedua adikku; Muhammad Fakhri Syukri dan Muhammad Rizky Rakhman. Terimakasih untuk segala *support* dan bantuannya selalu. Ditunggu kesuksesannya dek, semangat!
11. Sahabat-sahabat terbaikku; Armelia Putri, Putri Chairani Meza, Indika Meutia Putri. Jangan mudah ngeluh untuk proses, semoga sukses ya kalian semua!
12. *Ciwi-ciwi* rempong; Ucha, Elsi, Nadaa, Fitria, Seli. Terimakasih *guys*, selalu ada di momen-momen kita.

13. *Ngelem Group*. Sesisil, Sulton, Ferdinan, Arbud, Adon, Ardi, Lano, Abdul, Deni, Iqbal, Sidik, Sunu. Jangan pada betah kelamaan di kampus ya. Jangan mager inget umur, semangat skripsiannya!
14. S1 Akuntansi Paralel 2013. Tipeh, Ratu, Diska, Vectry, Syuhada, Kinan, Jania, Mutiara, Galuh, Dewi, Ayudia, Novi, Melin, Lala, Diena, Adit, Gus, Reni, Ulva, dll. *See you on top, guys!*
15. *Best team ever*, Presidium Himakta 15/16 Kabinet PROAKTIF. Fabio, Haryati, Dimas, Inun, Filo, Fera, Ely, Yuda, Anis, Ruchi, Nabila, Randa, Lano. Terimakasih untuk satu tahunnya *guys*, karena kalian ternyata masa-masa perkuliahan tidak selalu membosankan.
16. Sukananti *Crew*. Inun, Kak Robby, Kak Pras, Kak Surya, Kak Irul, Kak Afif. Terimakasih dua bulan KKN serta momen-momen terbaiknya, *keep mager and nge-trip!*
17. Teman-teman seperjuangan skripsi penunggu Gedung E. Pejuang September; Ayi, Faizah, Mesfi, Cepe, Fatma, Bagus, dan lain-lain. Akhirnya selesai juga drama perskripsian, selamat ya kalian.
18. Kak Jisung. Terimakasih untuk *sharing-sharingnya*, kabad!
19. Bang Johan *CCED*. Terimakasih untuk pengalaman, nasihat, serta ledakan-ledekannya yang membangun, bang. Semoga berguna untuk bekal kerja di kemudian hari, *insyaallah. Amin.*
20. *Best mate*, Audhitya Novandi Muhammad. Semoga sukses ya, jangan lupa bahagia! Doaku menyertaimu.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 19 Juli 2017  
Penulis,

**Etania Anjani**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>SANWACANA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Teori .....	11
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	11
2.1.2 Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	12
2.1.3 Pengukuran Kinerja Finansial Pemerintah Daerah .....	14
2.1.4 Pengukuran Kinerja Non Finansial Pemerintah Daerah .....	17

2.1.5	Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	20
2.1.6	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	20
2.1.7	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	22
2.1.8	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	23
2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	27
2.3	Kerangka Penelitian .....	28
2.4	Pengembangan Hipotesis .....	29
2.4.1	Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	29
2.4.2	Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	30
2.4.3	Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	31
2.4.4	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Populasi dan Sampel .....	34
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	35
3.3	Definisi Operasional Variabel .....	35
3.4	Metode Analisis Data .....	37
3.4.1	Statistik Deskriptif .....	37
3.4.2	Analisis Regresi Linier Berganda .....	37
3.4.3	Estimasi Data Panel .....	38
3.4.4	Pemilihan Metode Regresi Data Panel .....	39
3.4.5	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.4.5.1	Uji Normalitas.....	39
3.4.5.2	Uji Autokorelasi.....	40
3.4.5.3	Uji Multikolinearitas .....	41
3.4.5.4	Uji Heteroskedastisitas.....	41
3.4.6	Pengujian Hipotesis .....	42
3.4.6.1	Uji Koefisien Determinasi ( <i>AdjustedR<sup>2</sup></i> ).....	42
3.4.6.2	Uji Statistik F .....	42



3.4.6.3 Uji Statistik t .....	42
-------------------------------	----

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	44
4.2 Analisis Data .....	45
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	45
4.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	48
4.2.2.1 Uji Chow.....	48
4.2.3 Uji Asumsi Klasik .....	49
4.2.3.1 Uji Normalitas .....	49
4.2.3.2 Uji Autokorelasi .....	51
4.2.3.3 Uji Multikolinearitas.....	52
4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas .....	53
4.2.4 Uji Hipotesis .....	54
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( <i>AdjustedR<sup>2</sup></i> ).....	54
4.2.4.2 Uji Statistik F.....	55
4.2.4.3 Uji Statistik t.....	56
4.3 Pembahasan.....	58
4.3.1 Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	58
4.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	59
4.3.3 Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	60
4.3.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	61

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan.....	63
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	64
5.3 Saran.....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan .....	18
2.2 Indikator Kinerja Kunci EKPPD .....	24
2.3 Skala Interval Kategori Skor EKPPD.....	26
2.4 Penelitian Terdahulu .....	27
3.1 Ringkasan Pengukuran Variabel .....	36
3.2 Aturan Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson (DW-Test) .....	40
4.1 Proses Pengambilan Sampel Penelitian .....	44
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	45
4.3 Hasil Uji Chow .....	48
4.4 Hasil Uji Autokorelasi .....	51
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	52
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	53
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>AdjustedR<sup>2</sup></i> ).....	54
4.8 Hasil Uji Statistik F .....	55
4.9 Hasil Uji Statistik t .....	56
4.10 Hasil Hipotesis.....	58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Hasil Prestasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012-2014.....	3
1.2 Prestasi Sangat Tinggi pada Kabupaten/Kota di Indonesia .....	4
1.3 Prestasi Rendah pada Kabupaten/Kota di Indonesia .....	5
2.1 Model Penelitian .....	29
4.1 Hasil Uji Normalitas .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Indonesia

Lampiran 2 : Data Pengamatan Tahun 2012

Lampiran 3 : Data Pengamatan Tahun 2013

Lampiran 4 : Data Pengamatan Tahun 2014

Lampiran 5 : Hasil Uji Statistik *Eviews 8*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

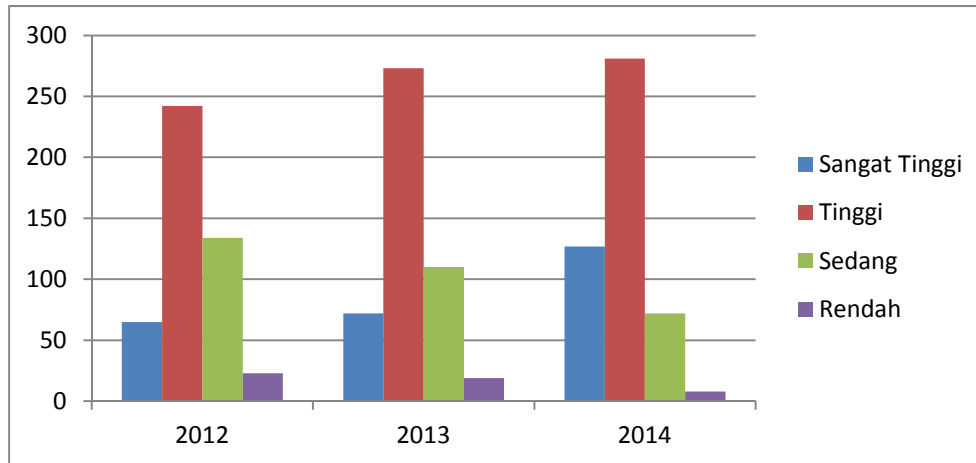
Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan tersebut mulai diberlakukan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan dari tahun 1999. Dengan diberlakukannya aturan tersebut, pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur pembangunan daerahnya sendiri yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Seiring dengan kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus melakukan transparansi informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah. Fokus perhatian organisasi sektor publik terhadap isu

kinerja dimulai oleh pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan prioritas utama dalam mengembangkan strategi baru terkait sistem pengukuran kinerja. Fokus tersebut disahkan dalam *The Government Performance and Results Act of 1993* (Atkinson et al. 1997). Tuntutan akuntabilitas publik tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting* yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, tetapi juga melakukan *horizontal reporting* yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007.

Sebagai tindak lanjut atas kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berisi tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). EKPPD merupakan proses penilaian secara sistematis terhadap kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Lebih lanjut pelaksanaan EKPPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. EKPPD menggunakan LPPD sebagai bahan informasi utama dalam penilaian kinerja pemerintah yang hasil akhirnya berupa skor kinerja. Kriteria penilaian yang ditetapkan terhadap skor kinerja yaitu antara 1-4 dengan kategori prestasi sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.

Berikut merupakan hasil prestasi kinerja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012-2014:

**Gambar 1.1****Hasil Prestasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012-2014**

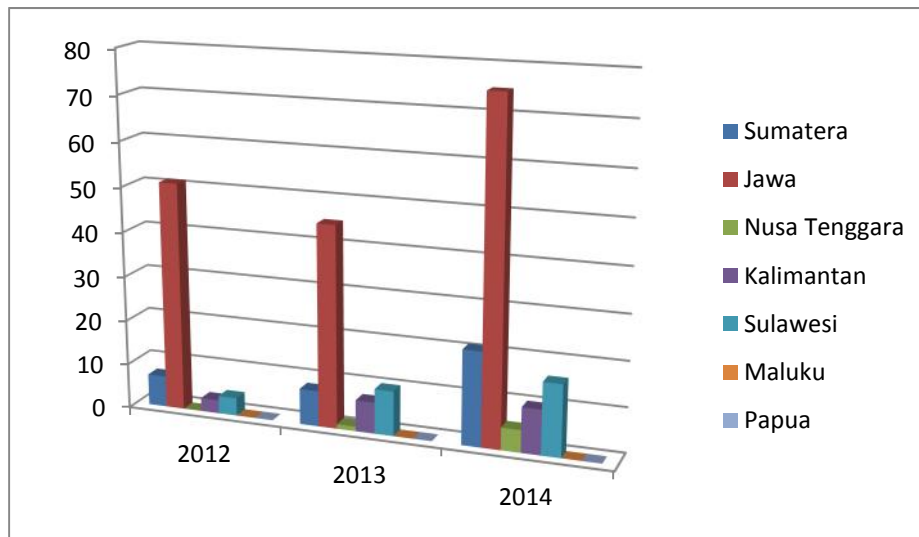
Sumber: *Otda Kemendagri (data diolah)*

Berdasarkan data pada Gambar 1.1, grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi kinerja pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012-2014. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kategori prestasi sangat tinggi dan tinggi yang selalu meningkat dan jumlah kategori prestasi sedang dan rendah yang cenderung menurun pada periode tersebut.

Meskipun telah terjadi peningkatan yang signifikan, namun setelah ditinjau kembali hasil prestasi kinerja tersebut belum tersebar secara merata pada setiap daerah di Indonesia. Perolehan prestasi kinerja dengan kategori yang tertinggi dan paling rendah ternyata tidak seimbang pada daerah-daerah di Indonesia bagian barat, tengah, ataupun timur. Berikut merupakan jumlah penyebaran prestasi kinerja dengan kategori sangat tinggi yang diraih oleh daerah-daerah pada kabupaten/kota di Indonesia:

**Gambar 1.2**

**Prestasi Sangat Tinggi pada Kabupaten/Kota di Indonesia**

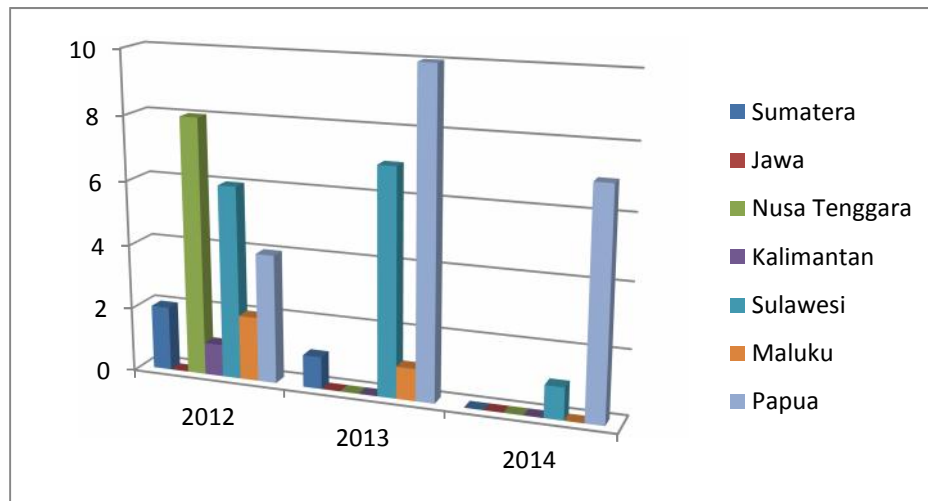


Sumber: *Otda Kemendagri (data diolah)*

Dilihat dari Gambar 1.2, kategori prestasi sangat tinggi rata-rata diraih oleh pemerintah kabupaten/kota yang terletak di Indonesia bagian barat. Dalam hal ini, daerah yang paling dominan adalah Pulau Sumatera dan Jawa. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan pada daerah Indonesia bagian tengah yaitu Pulau Nusa Tenggara dan Kalimantan meskipun tidak terlalu signifikan. Namun untuk daerah Indonesia bagian timur hanya Pulau Sulawesi yang cenderung mengalami peningkatan, sedangkan Pulau Maluku dan Papua belum ada satu pun kabupaten/kota yang meraih gelar sangat tinggi pada periode tersebut.

Kemudian berikut merupakan jumlah penyebaran prestasi kinerja dengan kategori rendah yang diraih oleh daerah-daerah pada kabupaten/kota di Indonesia:



**Gambar 1.3****Prestasi Rendah pada Kabupaten/Kota di Indonesia**

Sumber: *Otda Kemendagri (data diolah)*

Dilihat dari Gambar 1.3, kategori prestasi rendah rata-rata diraih oleh pemerintah kabupaten/kota yang terletak di Indonesia bagian timur. Dalam hal ini, daerah yang paling dominan adalah Pulau Sulawesi dan Papua. Pada tahun 2012-2014, hanya daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang konsisten tidak memperoleh kategori rendah. Pada daerah Indonesia bagian timur, Pulau Nusa Tenggara dan Kalimantan mengalami penurunan yang signifikan untuk kategori ini. Sedangkan untuk daerah Indonesia bagian timur yaitu Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua masih mendominasi dalam memperoleh prestasi kinerja rendah meskipun sudah cenderung menurun.

Karena masih terdapat perbedaan yang signifikan atas perolehan kategori prestasi kinerja pada daerah-daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk periode tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia belum berjalan dengan begitu baik secara keseluruhan.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional yang berarti tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif (Mardiasmo, 2009). Informasi yang diberikan tidak cukup dengan ukuran finansial saja, tetapi juga diperlukan informasi dari sisi non finansial. Terkait dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberikan tanggungjawab untuk dapat menggali sumber pembiayaan lokal dan membuat keputusan belanja secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan harus dapat dikelola secara baik dalam bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan daerahnya tersebut dapat tercermin dari tingkat kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan daerah sebagai aspek finansial.

Pengelolaan keuangan yang baik seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang merupakan komponen dari pengukuran aspek non finansial.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan yaitu kesehatan dan pendidikan karena keduanya merupakan modal utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adzani dan Martani (2014) menyatakan peran pendidikan dan kesehatan merupakan

faktor utama tingkat pembangunan manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan nasional.

Bloom (2007) menyatakan bahwa:

*“Increasing the productivity of publicly funded infrastructure and human capital is an imperative faced by every nation, especially in the health sector, where most nations are struggling with almost continuous increases in the proportion of national budgets spent each year on health and health care”.*

Setiap negara harus dapat meningkatkan produktivitas infrastruktur dan pembangunan manusia, terutama di sektor kesehatan, di mana sebagian besar negara selalu berupaya melakukan peningkatan dalam proporsi anggaran nasional yang dikeluarkan setiap tahun untuk kesehatan dan perawatannya. Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai demi tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat.

Kemudian dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas manusia, pendidikan juga menjadi gerbang utama dan sudah mejadi hak setiap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Permasalahan mendasar yaitu masih banyaknya anak-anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Hal ini berarti pemerintah daerah belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam penelitian sebelumnya, Mustikarini dan Fitriasari (2012), Fontanella dan Rossieta (2014), Artha, dkk (2015), serta Mudhofar dan Tahar (2016) menunjukkan tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif dan tingkat ketergantungan daerah

berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, Adzani dan Martani (2014) membuktikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dari aspek pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Aspek Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012-2014”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah aspek finansial yang diukur dari tingkat kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakah aspek non finansial yang diukur dari tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
2. Penelitian dilakukan pada kabupaten/kota di Indonesia yang bukan merupakan daerah pemekaran baru.

3. Analisis dilakukan pada data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012-2014 yang dipublikasikan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan.
4. Analisis dilakukan pada hasil skor EKPPD kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012-2014 yang dipublikasikan di situs Kementerian Dalam Negeri.
5. Analisis dilakukan terhadap data Angka Harapan Hidup dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012-2014 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aspek finansial dan aspek non finansial terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi beberapa pihak:

1. Bagi Pemerintahan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek finansial dan non finansialnya.

## 2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan teori dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan beberapa jasa dan pembuatan keputusan untuk kepentingan mereka. Dalam hal ini, *principal* dan *agent* sama-sama memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan mereka sehingga cenderung menimbulkan konflik keagenan yaitu *moral hazard*, ketika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati untuk kepentingan bersama dan *adverse selection* yang dimana pihak *principal* tidak mengetahui keputusan yang diambil atau informasi yang diperoleh oleh agen.

Lane (2003) berpendapat bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal dan agen. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam organisasi sektor publik merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen.

Teori keagenan pada organisasi sektor publik berfokus pada persoalan asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu perbedaan distribusi informasi antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya peyelewengan oleh agen (pemerintah). Oleh karena itu, pihak pemerintah (*agent*) harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya dengan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat (*principal*) agar dapat mengurangi asimetri informasi. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

### **2.1.2 Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja**

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Abdullah dan Febriansyah, 2015). Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan



untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2009) menyatakan, pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik berfungsi untuk memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, dan untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, informasi yang digunakan terbagi menjadi dua kategori yaitu informasi finansial dan informasi non finansial.

#### 1. Informasi Finansial

Salah satu cara pengukuran kinerja adalah menggunakan informasi finansial. Pada penilaian laporan kinerja keuangan, pengukuran didasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan analisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada varians pendapatan dan varians pengeluaran.

#### 2. Informasi Non Finansial

Informasi non finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya karena dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Jenis informasi non finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variable*). Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor penyebab kesuksesan suatu organisasi.

### **2.1.3 Pengukuran Kinerja Finansial Pemerintah Daerah**

Faktor keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang merupakan sumber daya kapital bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah (Wulandari, 2001).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari (UU No. 33/2004, Pasal 6 ayat 1):
  1. Pajak Daerah, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah yaitu:
    - a) Pajak Provinsi, yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
    - b) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak pengambilan bahan galian golongan C; dan pajak parkir.
  2. Retribusi Daerah, yang terdiri atas retribusi jasa umum; retribusi jasa usaha; retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi bagian laba perusahaan milik daerah; bagian laba lembaga keuangan bank; bagian laba lembaga keuangan non bank; dan bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
  4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah daerah.
- b. Dana Perimbangan, adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan terdiri atas:
1. Dana Bagi Hasil, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
  2. Dana Alokasi Umum, adalah bagian dari dana perimbangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diberikan setiap tahunnya yang bersumber dari dana APBN, dimana besarnya dana yang diberikan tersebut ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah.

3. Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan, terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Dalam hal ini, kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna mendukung keberlangsungan pembangunan daerah yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan (Mahmudi, 2013). Adapun metode yang dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Rasio keuangan yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya yaitu rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan daerah.

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2013). Dalam hal ini, tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat dilihat pada besarnya derajat desentralisasi suatu daerah.

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan efek positif yaitu peningkatan kinerja Pemda (Fontanella dan Rossieta, 2014). Dengan adanya desentralisasi fiskal dapat memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun kemandirian dalam

memperoleh pendanaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio tersebut adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: *Akuntansi Sektor Publik (Mahmudi, 2013)*

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2013). Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio tersebut adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: *Akuntansi Sektor Publik (Mahmudi, 2013)*

#### **2.1.4 Pengukuran Kinerja Non Finansial Pemerintah Daerah**

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa jenis informasi non finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau sering dinamakan sebagai *key succes factor* atau *key result factor*. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kinerja yang bersangkutan. Indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang bertujuan untuk

melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang beberapa aspek pada umumnya menjadi hal utama sebagai tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan rincian dari urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan**

<b>Urusan Wajib</b>			
<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>No.</b>	<b>Bidang</b>
1	Pendidikan	14	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	Kesehatan	15	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3	Lingkungan hidup	16	Perhubungan
4	Pekerjaan umum	17	Komunikasi dan informasi
5	Penataan ruang	18	Pertahanan
6	Perencanaan pembangunan	19	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
7	Perumahan	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
8	Kepemudaan dan olahraga	21	Pemberdayaan masyarakat desa
9	Penanaman modal	22	Sosial
10	Koperasi dan UKM	23	Kebudayaan
11	Kependudukan dan catatan sipil	24	Statistik
12	Ketenagakerjaan	25	Kearsipan
13	Ketahanan pangan	26	Perpustakaan
<b>Urusan Pilihan</b>			
<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>No.</b>	<b>Bidang</b>
1	Kelautan dan perikanan	5	Pariwisata
2	Pertanian	6	Industri
3	Kehutanan	7	Perdagangan

4	Energi dan sumber daya mineral	8	Ketransmigrasian
---	--------------------------------	---	------------------

Sumber: *PP No. 3 Tahun 2007*

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), indikator utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak yang merupakan komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian ini, aspek yang digunakan adalah indikator kesehatan dan pendidikan.

Dimensi kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Date Rate*).

Dimensi pendidikan diukur dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Dalam penelitian ini menggunakan Angka Rata-Rata Lama Sekolah untuk melihat kualitas penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut merupakan metode perhitungan Angka Rata-Rata Lama Sekolah oleh Badan Pusat Statistik:

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$$

$P_{15+}$  = jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas

Lama sekolah penduduk ke-i =

a. Tidak pernah sekolah = 0

b. Masih sekolah SD s.d S1 = -1

c. Masih sekolah S2/S3 = +1

### **2.1.5 Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi. Dengan demikian, pembuatan laporan kinerja adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat. Hal ini perlu dilakukan untuk mempertahankan dan memfokuskan pada apa yang sedang dicapai dan dihasilkan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

### **2.1.6 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. LPPD dapat



dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat.

PP No. 3 Tahun 2007 pasal 2 menyebutkan ruang lingkup dalam LPPD mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi 33 urusan pemerintahan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan keunggulan daerah.

Kemudian, ruang lingkup LPPD juga mencakup tugas pembantuan untuk kabupaten/kota meliputi:

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
- c. Tugas pembantuan kepada desa.

Sedangkan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Kerjasama antar daerah;
- b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. Pembinaan batas wilayah;
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;

- g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

### **2.1.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan keuangan merupakan *output* dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi keuangan bagi pihak-pihak tertentu sebagai dasar pembuatan keputusan serta sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja (Mahmudi, 2013).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun komponen dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi:

- a. Neraca Pemerintah Daerah
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- f. Laporan Arus Kas (LAK)
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

### **2.1.8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara tahunan. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dalam pemberian peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional. Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi, kabupaten/kota. Selain LPPD sebagai sumber informasi utama, informasi pelengkap yang digunakan berupa laporan pertanggungjawaban APBD, laporan kinerja instansi pemerintah, dan informasi keuangan daerah lainnya. Hasil dari EKPPD berupa Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan EKPPD, EKPPD menggunakan sistem pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama

yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Indikator kinerja kunci atau capaian kinerja yang digunakan yaitu meliputi beberapa aspek-aspek yang terdiri dari beberapa fokus pada tataran pengambil dan pelaksanaan kebijakan. Aspek-aspek tersebut merupakan capaian standar pelayanan minimal pemerintah daerah yang merupakan urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut merupakan indikator dari aspek tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dapat dilihat dalam rincian tabel 2.2:

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Kunci EKPPD**

Aspek Tataran Pengambilan Kebijakan Daerah	a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah
	b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
	c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah
	d. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD
	e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
	f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
	g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan
	h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah
	i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil
	j. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah
Aspek	k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD
	l. Pengelolaan potensi daerah
	m. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
	a. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
	b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
	c. Tingkat capaian standar pelayanan minimal

Tataran	d. Penataan kelembagaan daerah
Pelaksana	e. Pengelolaan kepegawaian daerah
	f. Perencanaan pembangunan daerah
Kebijakan	g. Pengelolaan keuangan daerah
	h. Pengelolaan barang milik daerah
Daerah	i. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

Sumber: *Permendagri No. 73 Tahun 2009*

Sistem pengukuran kinerja yang dimaksud mencakup:

- a. penetapan IKK;
- b. teknik pengumpulan data kinerja;
- c. metodologi pengukuran kinerja; dan
- d. analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.

Metode penilaian EKPPD selanjutnya yaitu dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja yang dimaksudkan adalah dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Penilaian Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut:

- a. Tingkat indeks capaian kinerja sebesar 95%
- b. Tingkat indeks capaian kesesuaian materi sebesar 5%

Metode pemberian skor untuk indeks capaian kinerja dan kesesuaian materi meliputi:

- a. Penggabungan pada IKK yang belum ada kriteria tingkat capaian melalui tahapan:
  1. penggabungan IKK;

2. dilakukan normalisasi data melalui rumus;
  3. dilakukan rata-rata nilai normalisasi; dan
  4. pemberian skor.
- b. Tanpa penggabungan pada IKK yang hanya 1 (satu) isian dari dua pilihan atau menyebutkan banyak daftar atau jumlah yang diisi dari daftar atau jumlah yang ditentukan. Pemberian skor pada masing IKK meliputi :
1.  $> (1,25\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 4$
  2.  $> (\text{rata-rata normalisasi})$  sampai dengan  $1,25\%$  rata-rata normal  $=3$
  3.  $> (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi})$  sampai dengan rata-rata normal  $=2$
  4.  $< (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 1$
- c. Tingkat pemberian skor :
1. Tingkat IKK;
  2. Tingkat urusan;
  3. Tingkat aspek;
  4. Tingkat capaian kinerja;
  5. Tingkat Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun skor EKPPD berada dalam range nilai 0-4 dengan kategori berikut sebagaimana dapat dilihat dalam rincian tabel 2.3:

**Tabel 2.3**

**Skala Interval Kategori Skor EKPPD**

<b>Skor</b>	<b>Kategori Prestasi</b>
0-1	Rendah
1-2	Sedang
2-3	Tinggi

3-4	Sangat Tinggi
-----	---------------

Sumber: PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ringkasan dari penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Dyah Setyaningrum & Febriyani Syafitri - <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia</i> (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	X: Ukuran Pemda, Ukuran legislatif, Umur administratif Pemda, Kekayaan Pemda, Rasio kemandirian, Diferensiasi fungsional, Spesialisasi pekerjaan, Pembiayaan utang, <i>Intergovernmental revenue</i> Y: Tingkat pengungkapan LKPD	Hasil penelitian ini menunjukkan hanya 4 (empat) variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD tahun 2008-2009, yaitu ukuran legislatif, umur administratif Pemda, kekayaan Pemda, dan <i>intergovernmental revenue</i> . Variabel lainnya yaitu ukuran Pemda, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang, dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan.
2.	Kurniatul Mudhofar & Afrizal Tahar - <i>Jurnal Akuntansi dan Investasi</i> (2016)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	X: Kemandirian Daerah, Ketergantungan pemerintah, Efektivitas realisasi PAD Y: Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan kemandirian daerah dan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Sementara

		Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja	Penyelenggaraan Pemda Z: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas tidak berpengaruh. Kinerja sebagai pemoderasi hanya berpengaruh atas hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.
3.	Amy Fontanella & Hilda Rossieta – <i>Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 17</i> (2014)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	X: Tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, tingkat kinerja Y: Akuntabilitas pelaporan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan kemandirian daerah dan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Sementara kinerja sebagai pemoderasi memperlemah pengaruh negatif ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.

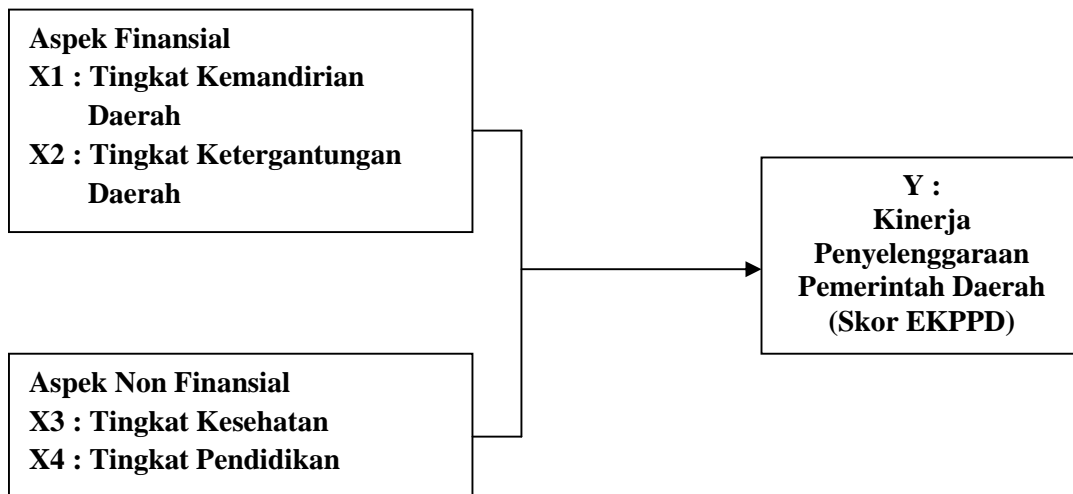
### 2.3 Kerangka Penelitian

Hubungan antar variabel disajikan dalam model penelitian berupa gambar berikut:



Gambar 2.1

## Model Penelitian



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah merupakan penambah nilai kekayaan bersih yang diakui dalam suatu periode. Dalam hal ini, Setyaningrum dan Syafitri (2012) menjelaskan bahwa tingkat kemandirian daerah dicerminkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri.

Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total pendapatan daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2013). Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk

melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan akan semakin baik (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012). Oleh karena itu, tingkat kemandirian daerah dapat menjadi tolak ukur dalam hal peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Martinez dan McNab (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang menggambarkan kemandirian daerah dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah. Lebih lanjut dibuktikan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Fontanella dan Rossieta (2014), serta Mudhofar dan Tahar (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

**$H_1$  : Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

#### **2.4.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja**

##### **Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana transfer yang berasal dari dana perimbangan adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi di Indonesia tidak hanya membawa perubahan positif melainkan juga perubahan negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi jika dalam pemenuhan modal pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat (Anis dan Ardi, 2007).

Mudhofar dan Tahar (2016) menjelaskan tingginya persentase jumlah dana transfer mengindikasikan bahwa Pemda tidak mandiri dalam mengelola pendapatannya dan dapat menyebabkan penilaian kinerja semakin rendah karena hal tersebut mencerminkan bahwa Pemda tidak mampu dalam merencanakan dan menjalankan program/kegiatan untuk mengoptimalkan PAD. Jika pada kondisi mandiri dan ketergantungan pada pemerintah pusat suatu Pemda rendah, seharusnya Pemda akan lebih mampu dalam menjalankan aktivitas keuangannya sendiri, seperti mengatur dan menggali potensi keuangan, penganggaran dan pengalokasian sehingga akan meningkatkan kinerja Pemda.

Hasil penelitian Fontanella dan Rossieta (2014), Artha, dkk (2015), serta Mudhofar dan Tahar (2016) menunjukkan bahwa ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian tersebut maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

***H<sub>2</sub> : Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.***

#### **2.4.3 Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan**

##### **Pemerintah Daerah**

Adzani dan Martani (2014) menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan hidup masyarakat salah satunya diukur dengan tingkat kesehatan masyarakat. Salah satu parameter dalam

tingkat kesejahteraan adalah indeks pembangunan manusia yang didalamnya terdapat indeks kesehatan masyarakat yang diukur dari rata-rata harapan hidup masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Jika Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat maka kondisi kesehatan masyarakat di daerah tersebut semakin baik. Adanya peningkatan kesehatan masyarakat daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga mencerminkan kinerja yang semakin baik.

Hasil penelitian Adzani dan Martani (2014) membuktikan tentang pengaruh tingkat kesehatan yang diprosikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

**$H_3$  : Tingkat kesehatan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

#### **2.4.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan**

##### **Pemerintah Daerah**

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas manusia, pendidikan juga menjadi salah satu faktor utama yang mendukung dan sudah menjadi hak setiap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Fincher (2007) menyatakan bahwa:

*“Governments do have discretion in how they approach the provision of higher education to their citizens”.*

Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk dapat menyediakan pelayanan di bidang pendidikan bagi setiap masyarakat daerahnya. Adzani dan Martani (2014) menjelaskan salah satu kinerja pendidikan ditunjukkan pada ukuran lamanya menempuh pendidikan. Rata-rata lama sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Tingginya tingkat pendidikan akan meningkatkan fungsi pengawasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga menjadikan pengelolaan pemerintahan lebih akuntabel (Swaroop dan Rajkumar, 2002). Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah suatu daerah menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek pendidikan.

Hasil penelitian Adzani dan Martani (2014) membuktikan tingkat pendidikan diprosikan dengan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu:

**$H_4$  : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *cluster sampling* dan *purposive sampling*. Pengambilan sampel secara kluster (*cluster sampling*) dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian yang kemudian dipilih secara *random* (Hartono, 2015). Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah 50% dari jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi yang kemudian dipilih secara *random*.

Selanjutnya, dari beberapa sampel *random* tersebut akan dipilih kembali dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Hartono, 2015). Dalam penelitian ini kriteria pemilihan sampel yang dipilih berupa:

1. Kabupaten/Kota yang bukan merupakan daerah pemekaran baru.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki data lengkap untuk tahun 2012-2014 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan,

skor hasil EKPPD yang dipublikasikan di situs Kementerian Dalam Negeri, serta Angka Harapan Hidup dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang dipublikasikan di situs Badan Pusat Statistik.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Data sekunder yang diperoleh berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Laporan Realisasi Anggaran, skor hasil EKPPD, data Angka Harapan Hidup (AHH), dan data Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2012-2014 yang bersumber dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan, situs Kementerian Dalam Negeri, dan situs Badan Pusat Statistik.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

#### 1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Aspek Finansial dan Aspek Non Finansial yang diukur dengan menggunakan data dari masing-masing komponen yang terdapat didalamnya. Aspek Finansial diukur dengan melihat hasil dari rasio tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan daerah.

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio tingkat kemandirian daerah adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio tingkat ketergantungan daerah adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan Aspek Non Finansial diukur dengan tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan yang menggunakan data Angka Harapan Hidup (AHH) dan data Angka Rata-Rata Lama Sekolah masyarakat kabupaten/kota di Indonesia.

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang muncul sebagai akibat dari adanya pengaruh dari variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dari skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Adapun skor kinerja pemerintah daerah berada dalam range nilai 0-4 dengan kategori sebagai berikut:

- a) Skor 0 – 1 = Rendah;
- b) Skor 1 – 2 = Sedang;
- c) Skor 2 – 3 = Tinggi;
- d) Skor 3 – 4 = Sangat Tinggi.

**Tabel 3.1**

### **Ringkasan Pengukuran Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Pengukuran</b>	<b>Sumber</b>
(X1) Tingkat Kemandirian Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran



(X2) Tingkat Ketergantungan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran
(X3) Tingkat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Badan Pusat Statistik
(X4) Tingkat Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Badan Pusat Statistik
(Y) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor EKPPD	Otda Kemendagri

### 3.4 Metode Analisis Data

#### 3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum mengenai variabel independen dan dependen yang di jabarkan dalam bentuk statistik (Ghozali, 2016).

#### 3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda. Analisis ini memberikan gambaran dan penjelasan pada hasil pengujian masalah pada hipotesis dengan melakukan pengukuran dan pembuktian data yang ada. Berikut persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini:

$$Y = \beta_1 \text{TKM} + \beta_2 \text{TKT} + \beta_3 \text{TKS} + \beta_4 \text{TPD} +$$

**Keterangan :**

- Y : Skor EKPPD
- TKM : Tingkat Kemandirian Daerah

TKT : Tingkat Ketergantungan Daerah  
 TKS : Tingkat Kesehatan  
 TPD : Tingkat Pendidikan  
 $\beta_1, \dots, \beta_4$  : Koefisien Regresi  
 $\epsilon$  : *error of estimation*

### 3.4.3 Estimasi Data Panel

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data panel seimbang (*balanced panel*) yaitu data kombinasi dengan jumlah observasi yang sama pada setiap subjeknya.

Pada estimasi data panel terdapat tiga metode yang sering digunakan yaitu metode *Ordinary Least Square (OLS) Pooled* atau *Common Effect*, *Fixed Effects Model (FEM)*, dan *Random Effects Model (REM)*.

Metode *OLS Pooled* atau *Common Effect* merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi sebuah regresi tanpa memedulikan sifat *time series* dan *cross section* pada data (Gujarati, 2012). Metode selanjutnya yaitu *Fixed Effects Model (FEM)* mengasumsikan adanya perbedaan pada intersep (konstanta) antar subjek namun tetap sama antar waktu, sedangkan koefisien (*slope*) tetap untuk setiap individual atau antar waktu. Teknik *Fixed Effects Model (FEM)* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk mengetahui adanya perbedaan.

Metode *Random Effects Model (REM)* merupakan metode yang digunakan dalam mengatasi masalah *Fixed Effects Model (FEM)*. Metode ini mengasumsikan bahwa komponen *error* individual tidak berkorelasi satu sama lain dan tidak ada autokorelasi baik antar individual atau antar waktu (Gujarati, 2012). Asumsi ini membuat komponen *error* dari individu dan waktu dimasukkan ke dalam *error term* gabungan sehingga metode ini juga dikenal sebagai *Error Components Model (ECM)*.

### 3.4.4 Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Pemilihan metode regresi dalam data panel yang akan digunakan dalam penelitian menggunakan Uji Chow. Uji Chow merupakan pengujian untuk memilih model terbaik antara *OLS Pooled* atau *Common Effect Model (CEM)* dengan *Fixed Effects Model (FEM)*. Uji Chow menggunakan hipotesa sebagai berikut:

Ho : *Common Effect Model (CEM)*

Ha : *Fixed Effects Model (FEM)*

Jika nilai Chow statistik  $F(\text{stat}) > F$  tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga *Fixed Effects Model (FEM)* lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model (CEM)* begitupun sebaliknya (Gujarati, 2012).

### 3.4.5 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis yaitu meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 3.4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas menjadi salah satu prasyarat pokok dalam analisis parametrik karena data-data yang akan dianalisis parametrik harus terdistribusi normal.

Pengujian normalitas dilakukan dengan histogram residual dan uji Jarque-Bera. Uji Jarque Bera mempunyai nilai *Chi-Square* dengan derajat bebas dua. Jika hasil uji Jarque-Bera < nilai *Chi-Square* pada  $\alpha = 5\%$ , maka terdistribusi normal. Jika hasil uji Jarque-Bera > nilai *Chi-Square* pada  $\alpha = 5\%$ , maka tidak terdistribusi normal. Pengujian normalitas ini juga bisa dilakukan dengan cara melihat nilai probabilitas pada hasil pengujian, probabilitas lebih besar dari pada  $\alpha = 5\%$  maka data tersebut terdistribusi secara normal (Widarjono, 2013).

### 3.4.5.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya dengan menggunakan *Durbin Watson Test (DW-Test)*. Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut (Gujarati, 2012):

**Tabel 3.2**

#### **Aturan Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson (DW-Test)**

<b>Hipotesis Nol</b>	<b>Keputusan</b>	<b>Jika</b>
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dL < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif	Terima	$dU < d < 4 - dU$

### 3.4.5.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi salah satunya adalah dengan menguji nilai *Tolerance* dan VIF. Nilai yang menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika nilai *Tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$  (Ghozali, 2016).

### 3.4.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji *White*. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Chi-Square* hitung yaitu  $n \cdot R^2$  yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai *Chi-Square* tabel. Jika nilai *Chi-square* hitung  $> Chi-square$  tabel, maka dapat disimpulkan model mengalami masalah heteroskedastisitas. Namun, sebaliknya jika nilai *Chi-square* hitung  $< Chi-square$  tabel, maka model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas (Gujarati, 2012).

### 3.4.6 Pengujian Hipotesis

#### 3.4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

#### 3.4.6.2 Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersamaan akan memiliki pengaruh yang signifikan kepada variabel dependen. Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi (Ghozali, 2016). Suatu model dianggap signifikan jika nilai probabilitas  $Prob(F\text{-Statistic}) < 0.05$ , karena itu semakin rendah nilainya akan semakin baik.

#### 3.4.6.3 Uji Statistik t

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Untuk melihat apakah koefisien variabel independen memiliki hubungan yang signifikan yaitu jika  $Prob(t\text{-statistic}) > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang

berarti tidak terdapat signifikansi. Sedangkan jika  $Prob(t\text{-statistic}) < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh aspek finansial dan aspek non finansial yang dilihat dari tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012- 2014. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dari keempat variabel independen (tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel independen tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total pendapatan daerah yang mencerminkan kemandirian daerah, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan semakin meningkat pada periode selanjutnya yang tercermin dari skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).



2. Variabel independen tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah jumlah dana transfer yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dalam total pendapatan daerah yang mencerminkan ketergantungan daerah, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan semakin meningkat pada periode selanjutnya yang tercermin dari skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
3. Variabel independen tingkat kesehatan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesehatan yang dicapai oleh pemerintah daerah, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan semakin meningkat pada periode selanjutnya yang tercermin dari skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
4. Variabel independen tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh pemerintah daerah, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan semakin meningkat pada periode selanjutnya yang tercermin dari skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua indikator dalam aspek finansial yaitu tingkat kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan daerah sedangkan masih banyak

indikator dalam aspek finansial lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan hasil yang lebih signifikan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan dua indikator dalam aspek non finansial dengan data sekunder yaitu tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan sedangkan masih terdapat indikator dalam aspek non finansial lainnya untuk dapat diobservasi dengan menggunakan data primer yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan hasil yang lebih signifikan.
3. Jumlah sampel dan periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian masih terbatas.
4. Terdapat beberapa kabupaten/kota baru pada beberapa provinsi di Indonesia setelah tahun 2011 sehingga berkemungkinan membuat perbedaan varians data yang cukup signifikan.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Menambahkan indikator lain yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek finansial, seperti menggunakan rasio lainnya yaitu rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan lain-lain. Serta menggunakan indikator lain dalam aspek non finansial dengan observasi data primer yaitu budaya kerja organisasi, kepuasan terhadap pelayanan pemerintah, dan lain-lain.

2. Menambahkan sampel penelitian untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan memperpanjang periode pengamatan agar dapat menggambarkan hasil penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah & Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan*.
- Adzani, Akhmad H. & Martani, Dwi. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidapatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok*.
- Atkinson, A. A., and J. Q. McCrindell. 1997. Strategic Performance Measurement in Government. *Cost & Management*, 20–23.
- Anis & Ardi. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Artha, Basuki, & MT., Alamsyah. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *Jurnal InFestasi*, Volume 11 Nomor 2.
- Bloom, Abby L. 2007. Efficiency in Government-Funded Health Care Services: The Use of Non-Health Sector Mechanisms to Encourage Efficiency. *Advances in Health Economics and Health Services Research*, Volume 18.
- Fincher, Mark. 2007. Governments as Human Capital Providers. *International Business Journal*, Volume 17.
- Fontanella, A. & H. Rossieta. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hartono, Jogiyanto. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFY Yogyakarta.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Volume 9 Nomor 1.

- Lane, Jan-Erik. 2003. Management and public organization: The principal-agent framework. *Working paper*. University of Geneva and National University of Singapore.
- Lindahman, Kara dan Thurmaier, Kurt. 2002. Beyond Efficiency and Economy: An Examination of Basic Needs and Fiscal Decentralization. *Journal of Public Economic*. USA: The University of Chicago.
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Martinez, V.J.M & McNab, R. 2001. Fiscal decentralization, economic growth, and democratic governance. *Working Paper*.
- Mudhofar, Kurniatul & Tahar, Afrizal. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 17 Nomor 2.
- Mustikarini, Widya Astuti & Fitriyani Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Saputra, Bambang & Mahmudi. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Volume 16 Nomor 2, Hal. 185-199.
- Setyaningrum, Dyah & Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9 Nomor 2, Hal. 154-170.

Swaroop, V. & Rajkumar, A.S. 2002. Public spending and outcomes: does governance matter. *World Bank Policy Research Working Paper*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika, Pengantar dan Aplikasinya*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 5 Nomor 2.